



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 ini dapat disusun dan disampaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami terhadap kinerja instansi yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2024.

LKIP ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja, baik dari segi output maupun outcome, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya laporan ini, kami berharap dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini, masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Lubuk Pakam, Februari 2025
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

**MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710616 199803 1 009**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 ini dapat disusun dan disampaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami terhadap kinerja instansi yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2024.

LKIP ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja, baik dari segi output maupun outcome, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya laporan ini, kami berharap dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini, masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Lubuk Pakam, Februari 2025
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**



**MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710616 199803 1 009**



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	5
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	6
1.2.2 Aspek Strategis	18
1.2.3 Anggaran	19
1.3 Dasar Hukum	19
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	22
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024	25
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Capaian Kinerja	29
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	29
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	30
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	34
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	36
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota	37
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ...	38
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	49
3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja	50
3.2 Realisasi Anggaran	58
BAB IV PENUTUP	59
LAMPIRAN	60



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan tahun 2024	19
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun Periode 2022-2024	23
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024	24
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024	25
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024	26
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024	26
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	29
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	30
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024	31
Tabel 3.4 Indeks Kepuasan Masyarakat per Triwulan.....	33
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja.....	34
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Capaian Pajak Daerah Tahun 2022, 2023 dan 2024.....	35
Tabel 3.7 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	37
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten Deli Serdang	38
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Provinsi dan Nasional	38
Tabel 3.10 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	39
Tabel 3.11 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	49
Tabel 3.12 Tabel Efisiensi Keuangan Daerah Otonom	50
Tabel 3.13 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	51
Tabel 3.14 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	58



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	7



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja dan anggaran pemerintah daerah, maka daerah dituntut untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari SAKIP, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang keuangan terkait pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. Capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Badan Pendapatan Daerah :



1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan terkait pendapatan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Deli Serdang. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas membantu Bupati Deli Serdang dalam menyelenggarakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan terkait pendapatan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Deli Serdang.

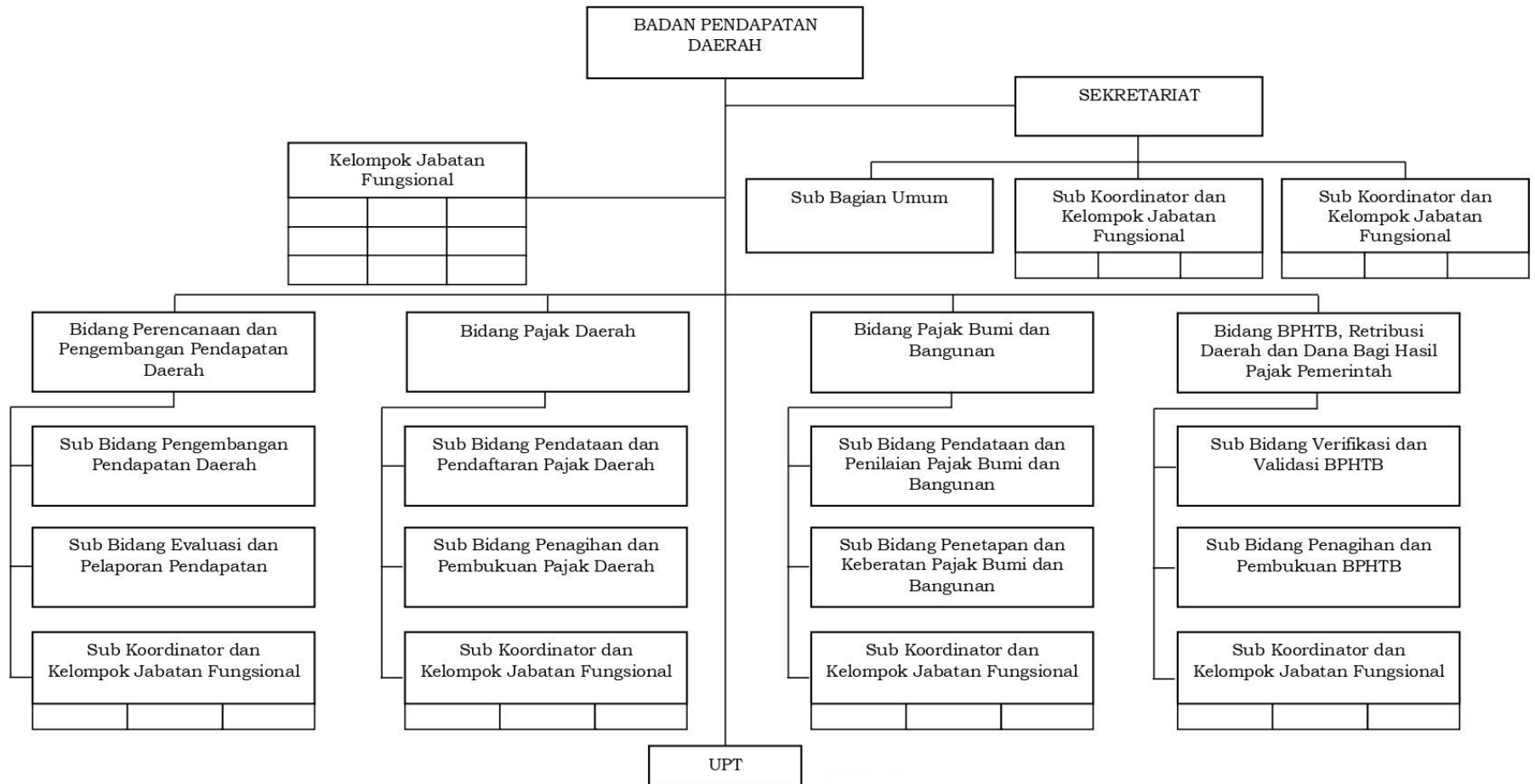
Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Pendapatan Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pendapatan Daerah;
4. Pembinaan teknis bidang keuangan terkait Pendapatan Daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah. Berikut bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah



Sumber Data : Perbup Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Tupoksi Badan Pendapatan Daerah



1. Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Pendapatan Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pendapatan Daerah;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas :

1. Menetapkan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
2. Menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah serta perubahannya;
3. Mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Pajak Daerah, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah serta Unit Pelaksana Teknis;
4. Menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
5. Menetapkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;
6. Menetapkan Surat Perjanjian Angsuran Pajak Daerah;
7. Menetapkan verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
8. Menetapkan Surat Keputusan tentang Keberatan Pajak Daerah;
9. Menetapkan Surat Keputusan tentang Pengurangan Pokok Pajak atau Denda Administrasi;
10. Memonitor dan evaluasi perkembangan penerimaan pendapatan daerah;
11. Mengoordinasikan penyusunan APBD di bidang pendapatan daerah dengan instansi terkait;
12. Melakukan pengawasan terhadap Inventaris Barang dan Aset Badan;
13. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Badan;
14. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
15. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
16. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



2. Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan anggaran Badan;
2. Pelaksanaan tugas Sekretariat Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;
3. Pembinaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sekretariat;
4. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

Uraian tugas :

1. Merumuskan program dan kegiatan Sekretariat;
2. Merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang;
5. Merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
6. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisa Beban Kerja (ABK) Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Badan Pendapatan Daerah;
7. Mengoordinasikan Penyusunan dan Implementasi Agenda Reformasi Birokrasi Badan Pendapatan Daerah;
8. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat;
9. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Umum;
2. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
3. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga Badan;



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

4. Melaksanakan pengelolaan aset Badan;
5. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama dan kehumasan, arsip dan dokumen pada Badan;
6. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
7. Menyusun rencana dan agenda Reformasi Birokrasi Badan Pendapatan Daerah;
8. Menyusun Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Forum Konsultasi Publik, dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
9. Memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan, serta penyusunan Analisis Jabatan (Anjab), dan Analisis Beban Kerja (ABK) Aparatur Sipil Negara pada Badan;
10. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bagian Umum;
11. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Umum;
12. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
13. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
2. Penyiapan bahan koordinasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.

Uraian tugas :

1. Merumuskan program dan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
2. Merumuskan kajian teknis perencanaan potensi pendapatan daerah;
3. Merumuskan produk hukum pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
4. Memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja di bidang pendapatan daerah;
5. Melaksanakan bimbingan teknis/sosialisasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah;
6. Mengevaluasi penyampaian dan realisasi SPTPD, SKPD dan SPPT PBB;



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

7. Melakukan evaluasi realisasi pendapatan daerah;
8. Mengoordinasikan data evaluasi pendapatan daerah yang telah diawasi dalam rangka pemeriksaan pendapatan daerah dengan bidang terkait;
9. Melaksanakan pelaporan realisasi dan tunggakan pendapatan daerah;
10. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
11. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
12. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
2. Menyusun bahan perumusan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
3. Menyusun data koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber-sumber pendapatan;
4. Menyusun kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah;
5. Memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja di bidang pendapatan daerah;
6. Menyusun data hasil pengawasan pemungutan pendapatan daerah;
7. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
8. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Kepala Sub Bidang Evaluasi Dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan;



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

2. Menyusun bahan pelaporan realisasi pendapatan;
3. Menyusun data tembusan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SPDN) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) yang disampaikan dari bidang terkait;
4. Menyusun data evaluasi dan koordinasi pendapatan daerah;
5. Menyusun data evaluasi penerimaan daerah yang belum tertagih untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Menyusun data evaluasi penyampaian dan realisasi SPTPD, SKPD dan SPPT PBB;
7. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan;
8. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. Kepala Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Pajak Daerah;
2. Penyiapan bahan koordinasi Bidang Pajak Daerah;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Pajak Daerah.

Uraian tugas :

1. Merumuskan program dan kegiatan Bidang Pajak Daerah;
2. Merumuskan Pajak Daerah;
3. Memvalidasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SPDN) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
4. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Keberatan Pajak Daerah;
5. Memvalidasi Surat Perjanjian Angsuran Pajak Daerah;
6. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Pengurangan Pokok Pajak Daerah atau Denda Administrasi;
7. Mengoordinasikan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang menunggak pajak;



8. Mengoordinasikan pembukuan realisasi, tunggakan dan pemeriksaan pajak daerah dengan bidang terkait;
9. Memfasilitasi wajib pajak tentang pendataan dan pendaftaran;
10. Memfasilitasi wajib pajak tentang penetapan, keberatan, pembatalan dan angsuran;
11. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Pajak Daerah;
12. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pajak Daerah;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8. Kepala Sub Bidang Pendataan Dan Pendaftaran Pajak Daerah mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
2. Meneliti formulir pendaftaran, SPTPD yang telah diisi oleh wajib pajak;
3. Meneliti data formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) wajib pajak;
4. Melaksanakan pendataan terhadap objek dan subjek pajak daerah;
5. Menyusun daftar induk wajib pajak dan menerbitkan NPWPD;
6. Menyusun data hasil pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah;
7. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
8. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

9. Kepala Sub Bidang Penagihan Dan Pembukuan Pajak Daerah mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah;
2. Memfasilitasi wajib pajak tentang penagihan tunggakan pajak daerah;
3. Memfasilitasi wajib pajak tentang banding, penghapusan atau pengurangan dan restitusi pajak daerah;
4. Meneliti data permohonan banding, penghapusan atau pengurangan, dan restitusi pajak daerah;
5. Menyusun data untuk pemeriksaan pajak daerah dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;



6. Menyusun konsep surat himbauan/teguran/tagihan tunggakan pajak daerah;
7. Menyusun pembukuan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah;
8. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah;
9. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
11. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

10. Kepala Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan;
2. Penyiapan bahan koordinasi Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan.

Uraian tugas :

1. Merumuskan program dan kegiatan Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Memvalidasi pendataan dan penilaian objek pajak bumi dan bangunan;
3. Memvalidasi penetapan objek pajak bumi dan bangunan;
4. Mengoordinasikan penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak pajak bumi dan bangunan;
5. Memvalidasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;
6. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
7. Memvalidasi Surat Perjanjian Angsuran Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Pengurangan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan atau Denda Administrasi;
9. Mengoordinasikan pembukuan realisasi, tunggakan dan pemeriksaan pajak bumi dan bangunan dengan bidang terkait;
10. Memfasilitasi wajib pajak tentang pendataan dan penilaian, penetapan dan keberatan serta penagihan pajak bumi dan bangunan;
11. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
14. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
15. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan



16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

11. Kepala Sub Bidang Pendataan Dan Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan mempunyai tugas:

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Memfasilitasi wajib pajak tentang pendataan dan penilaian objek pajak bumi dan bangunan;
3. Meneliti formulir /SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak;
4. Meneliti data formulir/Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) wajib pajak bumi dan bangunan;
5. Melaksanakan pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan di lapangan;
6. Menyusun penilaian objek pajak bumi dan bangunan.
7. Melaksanakan entry data hasil pelayanan pajak bumi dan bangunan dan perubahan peta;
8. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
11. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

12. Kepala Sub Bidang Penetapan Dan Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Memfasilitasi wajib pajak tentang penetapan pajak bumi dan bangunan;
3. Memfasilitasi wajib pajak tentang keberatan, pembatalan dan angsuran pajak bumi dan bangunan;
4. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;
5. Menerbitkan Surat Perjanjian Angsuran;
6. Menyusun data informasi objek dan subjek penetapan pajak bumi dan bangunan;
7. Meneliti data permohonan keberatan, angsuran dan pembatalan SPPT PBB;



8. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
11. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

13. Kepala Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah;
2. Penyiapan bahan koordinasi dalam Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah

Uraian tugas :

1. Merumuskan program dan kegiatan Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah;
2. Memvalidasi dan verifikasi pembayaran BPHTB;
3. Memfasilitasi wajib pajak tentang verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
4. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Restitusi BPHTB;
5. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Pengurangan atau Pembatalan BPHTB;
6. Mengoordinasikan penagihan terhadap wajib pajak yang tidak atau kurang bayar BPHTB;
7. Mengoordinasikan pembukuan realisasi dan tunggakan BPHTB dengan bidang terkait;
8. Melaksanakan kegiatan pembekalan/sosialisasi dalam rangka optimalisasi penerimaan BPHTB;
9. Mengoordinasikan penetapan anggaran dan realisasi dana bagi hasil pajak dengan Pemerintah Provinsi;
10. Mengoordinasikan pembukuan data realisasi retribusi daerah dengan bidang terkait;
11. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah;



12. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
14. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
15. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

14. Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Validasi BPHTB mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Verifikasi dan Validasi BPHTB;
2. Memfasilitasi wajib pajak tentang verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
3. Meneliti data dalam surat setoran BPHTB dengan dokumen pendukung yang menjadi persyaratan;
4. Menyusun data pembayaran BPHTB yang perlu dilakukan validasi lapangan;
5. Menyusun data dan informasi verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
6. Menyusun kegiatan pembekalan/sosialisasi dalam rangka optimalisasi penerimaan BPHTB;
7. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Verifikasi dan Validasi BPHTB;
8. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Verifikasi dan Validasi BPHTB;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

15. Kepala Sub Bidang Penagihan Dan Pembukuan BPHTB mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan BPHTB;
2. Memfasilitasi wajib pajak tentang penagihan BPHTB yang belum atau kurang bayar;
3. Memfasilitasi wajib pajak tentang keberatan, banding, penghapusan atau pengurangan dan restitusi BPHTB;
4. Menyusun konsep surat himbauan/teguran/tagihan BPHTB;
5. Meneliti permohonan keberatan, banding, penghapusan atau pengurangan dan restitusi BPHTB;
6. Menyusun pembukuan realisasi penerimaan BPHTB;
7. Menyusun data Surat Setoran BPHTB per bulan sesuai penerimaan rekening koran pada bank persepsi;
8. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan BPHTB;



9. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan BPHTB;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
11. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.2.2 Aspek Strategis

Kemandirian suatu daerah untuk membangun daerahnya melahirkan strategi-strategi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan sumber-sumber keuangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, baik dari sektor pajak maupun retribusi. Arah kebijakan yang ditempuh sebagai strategi untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih, terintegrasi dan sinergi melalui inovasi dan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel. Pendapatan daerah memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Peran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk mewujudkan pembangunan Deli Serdang yang maju dan sejahtera sangat signifikan mengingat Badan Pendapatan Daerah sebagai OPD fungsi keuangan terkait pendapatan daerah untuk mencari sumber-sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Strategi peningkatan PAD khususnya dari sektor pajak daerah merupakan strategi yang diterapkan guna peningkatan penerimaan pajak daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah selain dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, nantinya diharapkan bahwa pemerintah daerah secara bertahap dapat mengurangi ketergantungannya dari pemerintah pusat dan propinsi. Aspek dan peran strategis Bapenda untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Optimalisasi sumber pendapatan daerah untuk memastikan bahwa potensi pendapatan daerah, seperti pajak dan retribusi, dapat dimaksimalkan melalui kebijakan yang efektif dan efisien.
2. Peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, termasuk melalui sosialisasi dan fasilitas yang mempermudah proses pelayanan dan pembayaran.
3. Implementasi teknologi dalam pelayanan pajak dengan penggunaan sistem informasi yang modern untuk mempermudah transaksi pajak, baik dari sisi pemungutan maupun pelaporan.



4. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah untuk menjamin bahwa pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

1.2.3 Anggaran

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bapenda membutuhkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Jumlah	
		(3)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
APBD	Tahun 2023	Rp. 60.031.468.044,-	Rp. 63.224.358.779,-
APBD	Tahun 2024	Rp. 61.888.082.725,-	Rp. 75.933.876.116,-

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.



8. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Bapenda sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Bapenda. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;



7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja.
2. Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah. Tujuan juga merupakan akhir yang ingin dicapai atau hasil yang ingin dicapai atau dihasilkan di masa yang akan datang, yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 yang telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengatur penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang penyusunannya didasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Dalam RPJMD 2019 – 2024 disebutkan Visi Kabupaten Deli Serdang adalah :

“Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam ke Bhinekaan”.

Dengan misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan.



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

4. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
5. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang keuangan terkait pendapatan daerah, dalam hal ini mengemban misi ke-2 yaitu *"Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif"*.

Tujuan organisasi Badan Pendapatan Daerah adalah meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah dengan masing-masing sasarannya. Berikut indikator kinerja dan target kinerja tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 - 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target		
						2022	2023	2024
1	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Nilai PDRB (ADHB)			Triliun Rupiah	146,04	159,77	173,5
			Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	%	100	100	100
2	Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Poin	71,69	75,47	77,35
			Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	79	80	81
				Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	70,01	71,00	72,00

Sumber : Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah 2019-2024



Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	1.1	Persentase penerimaan pajak daerah	Persentase	Perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah dengan target pajak daerah yang ditetapkan. Untuk memastikan bahwa target penerimaan pajak daerah dapat tercapai agar program/kegiatan Kabupaten Deli Serdang yang telah direncanakan pada APBD dapat dilaksanakan seluruhnya. Dengan acuan target pajak daerah pada RPJMD Kabupaten Deli Serdang 2019-2024 yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, dan kebutuhan belanja daerah yang juga meningkat setiap tahun, sebagai salah satu sumber pendanaan APBD Kabupaten Deli Serdang diharapkan realisasi pajak daerah juga mengalami kenaikan capaian setiap tahunnya.	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Jumlah Target Pajak Daerah}} \times 100 \%$	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Nilai pada Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	
		2.2	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	Evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek sampai dengan pencapaian kinerja	Nilai LHE AKIP dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang	

Sumber : IKU (Indikator Kinerja Utama) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang



2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat didalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut rencana kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target APBD	Target P.APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Nilai PDRB (ADHB)			Triliun Rupiah	173,5	173,5
			Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	%	100	100
2	Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Poin	81	82
			Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81	82
				Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	72,00	72,00

Sumber : Rencana Kerja & Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pertunjukan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi (top level manager) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (middle level manager), untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Melalui perjanjian kinerja, maka akan terwujud komitmen untuk mencapai kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. PK ini juga merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Berikut perjanjian kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 :



Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 poin	82 poin
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	72 poin	72 poin

Sumber : Perjanjian Kinerja & Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) & Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 :

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target APBD	Target Perubahan APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	72	72
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	Sub Kegiatan	2	2
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2
I.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	Sub Kegiatan	3	3
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	OB	105	105
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	130	130
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	1
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81	82
II.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	Sub Kegiatan	1	1



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target APBD	Target Perubahan APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	1
II.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	Sub Kegiatan	7	7
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	23
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	35	54
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	7
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	4020	9540
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	84	92
II.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	Sub Kegiatan	2	3
1.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	14	18
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	16
II.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	Sub Kegiatan	3	3
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	100	100
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	48
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	45	45
II.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	Sub Kegiatan	3	3
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	21
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	90	91
3.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	1
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	2



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target APBD	Target Perubahan APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	44	50
III	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	Persen	100	100
III.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	Sub Kegiatan	15	15
1.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2	2
2.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	10	10
3.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	8	8
4.	Peyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	12	24
5.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	17547	17547
6.	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolaha, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	21550	21550
7.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	OP	5000	5000
8.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	517187	517187
9.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	64631	64631
10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	62949	62949
11.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	537939	537939
12.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	20	20
13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	19098	19098
14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	384	384
15.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	12	12

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPPA Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Badan Pendapatan Daerah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah yang dibuat sesuai ketentuan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja Badan Pendapatan Daerah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017



3.1.2 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun 2024

Hasil Pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	100%	66,82%	66,82 %	Sedang	Laporan Bendahara Penerimaan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 poin	82,50 poin	100,61 %	Sangat tinggi	Laporan IKM Bapenda
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	72 nilai	64,83 nilai	90,04%	Tinggi	Laporan Hasil Evaluasi Sakip Bapenda
	Rata-rata % Capaian				85,82 %	Tinggi	

Sumber : Laporan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

Jika dilihat dari tabel di atas, rata-rata persentase capaian sasaran strategis termasuk dalam kategori tinggi yaitu :

1. Sasaran strategis : meningkatnya penerimaan pajak daerah, dengan acuan target pajak daerah pada RPJMD Kabupaten Deli Serdang 2019-2024 yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, maka realisasi pajak daerah juga diharapkan mengalami kenaikan capaian setiap tahun. Namun capaian kinerja sasaran ini hanya tercapai 66,82% dari target yang telah ditetapkan.

Indikator sasarannya : persentase penerimaan pajak daerah. Indikator tersebut digunakan untuk memastikan bahwa persentase penerimaan pajak daerah dapat tercapai, agar program/kegiatan Kabupaten Deli Serdang yang telah direncanakan pada tahun 2024 dapat dilaksanakan seluruhnya terutama untuk belanja daerah yang bersumber dari pendanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan rincian target dan realisasi sebagai berikut :



Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024

No.	Jenis Penerimaan Pajak Daerah	Target	Realisasi	%
1	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	399.285.326.714,00	314.503.606.850,65	78,77
	- PBJT Jasa Perhotelan	10.500.000.000,00	11.817.536.110,55	112,55
	- PBJT Makanan dan/atau Minuman	52.500.000.000,00	57.224.632.402,10	109,00
	- PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	10.000.000.000,00	8.351.100.444,00	83,51
	- PBJT Tenaga Listrik	310.285.326.714,00	229.029.607.441,00	73,81
	- PBJT Jasa Parkir	16.000.000.000,00	8.080.730.453,00	50,50
2	Pajak Reklame	21.000.000.000,00	13.835.204.800,00	65,88
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	16.000.000.000,00	2.798.417.113,00	17,49
4	Pajak Air Tanah	20.700.000.000,00	13.948.331.086,00	67,38
5	Pajak Sarang Burung Walet	7.500.000.000,00	8.100.000,00	0,11
6	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	574.937.181.720,00	288.352.635.568,00	50,15
	- PBB Tahun Berjalan	319.131.659.665,00	261.390.589.993,00	81,91
	- Piutang PBB	255.805.522.055,00	26.830.022.965,00	10,49
7	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	285.611.340.335,00	251.998.190.552,00	88,23
	JUMLAH	1.325.033.848.769,00	885.444.485.969,65	66,82

- 1) PBJT Jasa Perhotelan dari target Rp. 10.500.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.11.817.536.110,55,- atau sebesar 112,55% dari target.
- 2) PBJT Makanan dan/atau Minuman dari target Rp. 52.500.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 57.224.632.402,10,- atau sebesar 109,00% dari target.
- 3) PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dari target Rp. 10.000.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.8.351.100.444,- atau sebesar 83,51% dari target.
- 4) PBJT Jasa Parkir dari target Rp. 16.000.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 8.080.730.453,- atau sebesar 50,50% dari target.
- 5) PBJT Tenaga Listrik dari target Rp. 310.285.326.714,- dapat terealisasi sebesar Rp.229.029.607.441,- atau sebesar 73,81% dari target.
- 6) Pajak Reklame dari target Rp. 21.000.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 13.835.204.800,- atau sebesar 65,88% dari target.



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

- 7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari target Rp. 16.000.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 2.798.417.113,- atau sebesar 17,49% dari target.
- 8) Pajak Air Tanah dari target Rp. 20.700.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 13.948.331.086,- atau sebesar 67,38% dari target.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet dari target Rp. 7.500.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 810.000,- atau sebesar 0,11% dari target.
- 10) Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan dari target Rp. 574.937.181.720,- dapat terealisasi sebesar Rp. 288.352.635.568,- atau sebesar 50,15% dari target sbb :
 - a. PBB tahun berjalan dari target Rp. 319.131.659.665,- dapat terealisasi sebesar Rp. 261.390.589.993,- atau sebesar 81,91%
 - b. Piutang PBB dari target Rp. 255.805.522.055,- dapat terealisasi sebesar Rp. 26.830.022.965,- atau sebesar 10,49%
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari target Rp. 285.611.340.335,- dapat terealisasi sebesar Rp. 251.998.190.552,- atau sebesar 88,23% dari target.

Pada tahun 2024, dapat dilihat bahwa jumlah capaian realisasi pajak daerah sebesar 66,82% dari target yang direncanakan sebesar 100%. Dengan capaian masing-masing pajak daerah ada yang melampaui target, ada juga yang tidak tercapai. Hasil pengukuran kinerja untuk masing-masing rincian jenis pajak dapat diketahui bahwa jenis pajak Pajak PBJT Hotel dan PBJT Restoran memiliki capaian kinerja di atas 100% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk jenis pajak lain capaian kinerjanya bervariasi dan belum memenuhi target. Dengan jumlah capaian nilai pajak tertinggi bersumber dari penerimaan pajak PBB sebesar Rp. 288.352.635.568,- (*dua ratus delapan puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*).

2. Capaian kinerja sasaran strategis ke-2 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah.
 - Indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai 100,61 % dengan kategori sangat tinggi. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dengan teknik pemberian kuesioner kepada pengguna layanan pajak daerah, baik dengan pengisian sendiri maupun dengan wawancara tatap muka secara kunjungan ke perusahaan atau tempat usaha dan di Kantor UPT pelayanan pajak daerah wilayah kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang. Survei dilaksanakan setiap triwulan dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3.4 Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Bapenda

No	Periode Penilaian	Nilai IKM
1	Triwulan I	80,00 Poin
2	Triwulan II	85,75 Poin
3	Triwulan III	94,00 Poin
4	Triwulan IV	70,25 Poin
	Nilai IKM Tahun 2024	82,50 Poin

Mayoritas masyarakat pengguna layanan menilai persyaratan pelayanan dinilai sangat baik, prosedur pelayanan dinilai baik, waktu pelayanan dinilai baik, biaya/tarif pelayanan dinilai sangat baik, produk jenis pelayanan dinilai baik, kompetensi pelaksana dinilai baik, perilaku pelaksana pelayanan dinilai baik, sarana dan prasarana dinilai baik, serta penanganan pengaduan dan saran dinilai baik.

- Indikator sasaran ke-2 Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah tercapai 90,04% dengan kategori tinggi. Nilai tersebut berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang selaku evaluator. Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek sampai dengan pencapaian kinerja. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja instansi pemerintah/unit kerja serta meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah/unit kerja terhadap kinerjanya.



3.1.3 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 dan tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
					Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	63,89%	62,91%	100%	66,82%	66,82 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,03 poin	81,87 poin	82 poin	82,50 poin	100,61%
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	60,15 poin	70,91 poin	72 poin	64,83 poin	90,04%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

1. Pada sasaran meningkatnya penerimaan pajak daerah, persentase capaian sarasannya pada tahun 2024 sebesar 66,82% lebih besar jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 selisih sebesar 3,91%, dan jika dibandingkan tahun 2022 lebih tinggi capaiannya sebesar 2,93%. Dapat dilihat dari masing-masing capaian pajak daerah sebagai berikut :



Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Capaian Pajak Daerah Tahun 2022, 2023 dan 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022 Setelah Perubahan			Tahun Anggaran 2023 Setelah Perubahan			Uraian	Tahun Anggaran 2024 Setelah Perubahan		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	8.247.975.000	5.997.886.543,00	72,72	10.000.000.000	9.093.789.233	90,94	PBJT Jasa Perhotelan	10.500.000.000	11.817.536.110,55	112,55
2	Pajak Restoran	38.750.000.000	35.612.706.786,00	91,90	49.142.500.000	43.622.306.334	88,77	PBJT Makanan dan/atau Minuman	52.500.000.000	57.224.632.402,10	109,00
3	Pajak Hiburan	5.200.000.000	6.231.245.474,00	119,83	9.980.000.000	8.320.462.550	83,37	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	10.000.000.000	8.351.100.444,00	83,51
4	Pajak Penerangan Jalan	295.105.000.000	203.334.563.003,00	68,90	295.000.000.000	213.042.327.681	72,22	PBJT Tenaga Listrik	310.285.326.714	229.029.607.441,00	73,81
5	Pajak Parkir	13.000.000.000	6.645.503.456,00	51,12	18.345.000.000	11.309.022.817	61,65	PBJT Jasa Parkir	16.000.000.000	8.080.730.453,00	50,50
6	Pajak Reklame	17.500.000.000	11.283.642.306,00	64,48	20.125.000.000	11.364.920.136	56,47	Pajak Reklame	21.000.000.000	13.835.204.800,00	65,88
7	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	30.000.000.000	1.042.473.810,00	3,47	16.000.000.000	2.564.438.695	16,03	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	16.000.000.000	2.798.417.113,00	17,49
8	Pajak Air Tanah	18.000.000.000	22.128.115.376,40	122,93	20.700.000.000	10.579.516.910	51,11	Pajak Air Tanah	20.700.000.000	13.948.331.086,00	67,38
9	Pajak Sarang Burung Walet	75.000.000	10.600.000,00	13,47	3.086.250.000	7.100.000	0,23	Pajak Sarang Burung Walet	7.500.000.000	8.100.000,00	0,11
10	PBB Perkotaan dan Pedesaan	507.219.272.055	217.210.595.465,00	42,82	565.704.443.305	220.558.219.773	38,99	PBB Perkotaan dan Pedesaan	574.937.181.720	288.352.635.568,00	50,15
11	Pajak BPHTB	268.500.000.000	258.172.195.926,00	96,15	260.000.000.000	267.272.114.049	102,80	Pajak BPHTB	285.611.340.335	251.998.190.552,00	88,23
	JUMLAH	1.201.597.247.055	767.669.528.145,40	63,89	1.268.083.193.305	797.734.218.178	62,91	JUMLAH	1.325.033.848.769	885.444.485.969,65	66,82



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

- Nilai capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 66,82% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 885.444.485.969,65
- Nilai capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 62,91 % dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 797.734.218.178,-
- Nilai capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 63,89 % dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 767.669.528.145,40

Realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 secara persentase mengalami kenaikan sebesar 3,91%, dengan jumlah penerimaan pajaknya mengalami kenaikan 10,99% sebesar Rp. 87.710.267.791,65 (*delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah enam lima sen*). Jika dibandingkan tahun 2022 mengalami kenaikan persentase sebesar 2,93% dengan jumlah kenaikan pajaknya 15,34% sebesar Rp.117.774.957.824,25 (*seratus tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah dua lima sen*).

2. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah dengan indikator :

- Indeks Kepuasan Masyarakat, capaian tahun 2024 sebesar 82,50 poin lebih besar dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 81,87 poin, ada peningkatan capaian sebesar 0,63 poin. Juga jika dibandingkan dengan tahun 2022 capaiannya sebesar 80,03 poin, lebih besar pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,47 poin.
- Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah capaian tahun 2024 sebesar 64,83 poin lebih kecil dibandingkan tahun 2023 dengan capaian sebesar 70,91 poin mengalami penurunan sebesar 6,08 poin. Tetapi jika dibandingkan tahun 2022 dengan capaian sebesar 60,15 poin, lebih besar capaian tahun 2024 dengan kenaikan sebesar 4,68 poin.

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Pendapatan Daerah Periode 2019-2024 diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3.7 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	66,82 %	100 %	66,82 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,50 poin	81,00 poin	101,85 %
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	64,83 poin	72,00 poin	90,04 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

1. Sasaran meningkatnya penerimaan pajak daerah, target akhir renstra tahun 2024 sebesar 100%. Tahun 2024 merupakan periode terakhir renstra perubahan 2019-2024, capaian pajak daerah sampai dengan akhir tahun dapat tercapai 66,82 %.
2. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah dengan indikator :
 - Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 81 poin. Capaian IKM pada tahun 2024 sebesar 82,50 poin sudah melebihi target pada renstra perubahan 2019-2024 mencapai 101,85%.
 - Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 72 poin. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah tahun 2024 sebesar 64,83 poin sehingga tercapai 90,04% dari target renstra perubahan 2019-2024.

3.1.5 Membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Kabupaten Deli Serdang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kabupaten	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	66,82 %	100%	66,82 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,50 poin	90,25 poin	91,41 %
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	64,83 poin	71,79 poin	90,31 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah



1. Sasaran meningkatnya penerimaan pajak daerah, Kabupaten Deli Serdang tidak menetapkan standar, tetapi diharapkan persentase penerimaan pajak daerah tercapai 100% agar program/kegiatan yang telah direncanakan pada APBD 2024 dapat dilaksanakan seluruhnya terutama yang menggunakan sumber dana dari penerimaan PAD. Tetapi persen capaian penerimaannya tahun 2024 hanya mencapai 62,91%.
2. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah :
 - Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), nilai IKM Kabupaten sebesar 90,25 poin jika dibandingkan nilai IKM Badan Pendapatan Daerah sebesar 82,50 poin maka persentase capaian Bapenda sebesar 91,41% terhadap capaian IKM Kabupaten.
 - Indikator nilai LHE AKIP, nilai AKIP Kabupaten sebesar 71,79 poin jika dibandingkan nilai LHE AKIP Badan Pendapatan Daerah sebesar 64,83 poin maka persentase capaian Bapenda sebesar 90,31% % terhadap LHE AKIP Kabupaten Deli Serdang.

Jika dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah yang dikelola Provinsi Sumatera Utara dan penerimaan pajak pusat/nasional yang dikelola Kementerian Keuangan RI dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Provinsi dan Nasional

No	Jenis Pajak	Terget Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Capaian Pajak Daerah Kab. Deli Serdang	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 5/4*100
1	Pajak Pusat/Nasional	100 %	100,5 %	66,82 %	66,49 %
2	Pajak Provinsi Sumatera Utara	100 %	85,05 %	66,82 %	78,57 %

Jika dilihat dari tabel di atas, untuk jenis pajak pusat/nasional pada tahun 2024 terealisasi 100,5% dari target dengan jumlah sebesar 1.932,4 triliun rupiah. Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan capaian 66,82%, jika dibandingkan maka persentase capaian Kabupaten sebesar 66,49% terhadap capaian pajak pusat/nasional. Dan jika dibandingkan dengan pajak propinsi Sumatera Utara dengan realisasi tahun 2024 sebesar 85,05%, maka Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang tercapai 78,57% terhadap capaian pajak Provinsi Sumatera Utara.

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.10 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	100%	66,82%	66,82%	1. Belum optimalnya penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah; 2. Belum adanya sanksi hukum yang tegas terhadap WP yang tidak patuh; 3. Belum optimalnya pendataan pajak daerah sehingga potensi pajak daerah belum tergali secara optimal; 4. Pengelolaan dan Penagihan piutang belum maksimal.	1. Rapat-rapat koordinasi dan evaluasi Penerimaan Pajak Daerah dan PAD secara rutin; 2. Menyampaikan surat permohonan permintaan konfirmasi data dasar pengenaan pajak PBB-P2; 3. Melaksanakan penagihan terhadap piutang PBB-P2 langsung kepada wajib pajak secara door to door; 4. Melaksanakan survei pendataan dan penambahan pemasangan alat rekam data transaksi (tapping box); 5. Melaksanakan penongkrongan/ pengawasan wajib pajak atas kepatuhan kewajiban pajak pada Pajak Restoran, Hotel, dan Hiburan; 6. Diskon pokok PBB masa pajak 2024 dan Gebyar undian berhadiah untuk menarik animo masyarakat; 7. Pelayanan penerimaan pembayaran PBB-P2 dan pajak daerah lainnya di pusat keramaian dan pada hari libur; 8. Pembayaran pajak daerah secara online melalui aplikasi Virtual Account, aplikasi pembayaran non tunai via QRIS di Bank Sumut; 9. Melakukan pembaruan sistem dengan Geografik Information Sistem Layout (GIS-EL) PBB yang modern dan teknologi terkini; 10. Koordinasi serta akselerasi perluasan dan percepatan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah (TP2DD); 11. Penempelan stiker belum membayar pajak pada objek yang belum membayar pajak; 12. Pemasangan panduk dan baliho himbauan pembayaran pajak, informasi pembayaran, manfaat pajak daerah, diskon pajak serta undian berhadiah; 13. Koordinasi dan kerjasama dengan pihak Bank Sumut, BRI, Bank Mega Syariah, BPN, DPRD Kabupaten Deli Serdang, Bapenda Propinsi Sumatera Utara dan Samsat UPT Lubuk Pakam.
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 poin	82,50 poin	100,61%	Pelayanan pajak daerah dinilai baik	Pengembangan pelayanan secara online
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	72 poin	64,83 poin	90,04 %	Masih kurangnya perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja dan akuntabilitas kinerja internal.	Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja dan akuntabilitas kinerja internal.

Sumber : Badan Pendapatan Daerah



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

Penyebab tidak tercapainya sasaran meningkatnya penerimaan pajak daerah, dengan persentase penerimaan pajak daerah sebesar 66,82 % sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pendataan pajak daerah sehingga potensi pajak daerah belum tergali secara optimal;
2. Belum adanya sanksi hukum yang tegas terhadap WP yang tidak patuh;
3. Pengelolaan dan penagihan piutang pajak belum maksimal;
4. Adanya penurunan tarif pajak hiburan untuk tontonan film;
5. Masih adanya tunggakan pembayaran listrik setiap bulannya;
6. Adanya penurunan tarif pajak parkir;
7. Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak daerah masih rendah;
8. Banyaknya tiang reklame yang dipakai untuk pelaksanaan pemilu, pileg dan pilkada;
9. Banyaknya kuari illegal bahan mineral bukan logam dan batuan;
10. Adanya penurunan tarif pajak MBLB;
11. Berkurangnya wajib pajak aktif dari Kawasan KIM;
12. Wajib pajak tidak berada di lokasi/bangunan sarang burung walet;
13. Adanya digitalisasi permohonan sertifikat tanah (alih media);
14. Adanya isu dari Kementerian mengenai pembebasan pajak untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
15. Wajib pajak BPHTB adalah wajib pajak tidak tetap;
16. Domisili wajib pajak PBB yang berada di luar Kabupaten Deli Serdang.

Berbagai upaya dan solusi telah dilakukan untuk mencapai target sasaran tersebut antara lain :

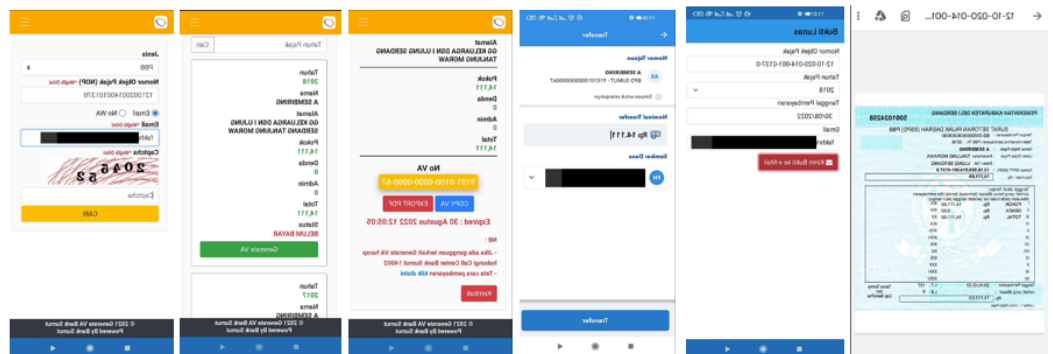
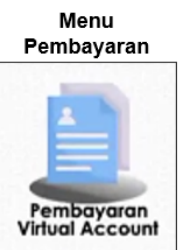
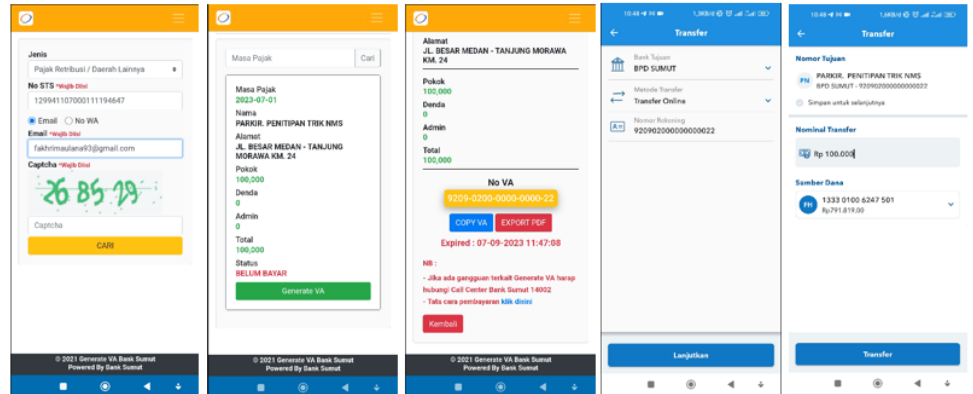
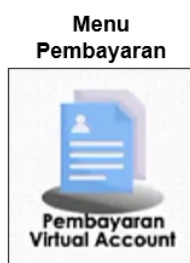
1. Melakukan Gebyar PBB-P2 Kabupaten Deli Serdang sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan pemberian reward atas kepatuhan Wajib Pajak yang tepat waktu dalam membayar kewajiban pajaknya





2. Melakukan Pelayanan Publik yaitu kecepatan, kemudahan, transparansi, kualitas dan digitalisasi pelayanan publik serta tata kelola dan manajemen pelayanan publik berbasis elektronik/teknologi informasi).

- Pembayaran Pajak Lainnya dari semua Bank via Virtual Account





Menu melihat tungakan

[illegible]

- **Pendaftaran Wajib Pajak Daerah** : PBJT Perhotelan, PBJT Atas Makanan & Minuman (Restoran), PBJT Atas Jasa Kesenian & Hiburan, PBJT Atas Tenaga Listrik, PBJT atas Jasa Parkir, Pajak Reklame, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah



e-Pajak Daerah
Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Deli Serdang
 Kabupaten Deli Serdang

Anda login sebagai :

☒ User
☐ Staf Keuangan
☐ Staf Pajak Daerah

Username

Password

[Login](#)
[Daftar](#)
[Lupa Password](#)

Copyright © 2018 BPPD Kabupaten Deli Serdang

☒ Register


Step 1


Step 2

Step 1 - Lengkapi Data Wajib Pajik

Social Media Negeri
☒ FB ☐ WA

☒ Pendidikan
☐ Badan Usaha

Social Media Substansi
☐ Dalam Negeri ☐ Luar Negeri

NP

Nama Subjek

Nomor

Kode PDS

Email

No HP

[Kembali](#)

The screenshot shows the 'i-Registro' application interface. At the top, there is a progress bar with two steps: 'Langkah 1' (completed) and 'Langkah 2' (current). Below the progress bar, the title 'Step 2 : Langkah Data Login' is displayed. The form contains several input fields: 'Username Login', 'Email', 'Password', 'Nama Sandi', and 'Nama Nominasi'. A 'Tampilkan untuk menguji login' button is located below the 'Nama Nominasi' field. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Sertakan data pendaftaran lainnya yang mungkin akan berguna' and a 'Selanjutnya' button.

- Barcode SPTPD Online

No SPTPD	:	
Masa Pajak	:	01 Mei 2024 s/d 31 Mei 2024
Nominal Pajak	:	620.000,00
NPWPD	:	P.2.002/SO07.04.08
Nama	:	HIB - "RADIANCE SPA"
Aalamat	:	JL. SLAMET KETAREN KOMPR MMTC BLOK H NO. 39
No STS	:	129941103000111207918

Tahun _____
Yang Menerima,



- Barcode SKPD Online

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG BADAN PENSIKAPAN DAERAH LURUH PAKAR - 20534		SURAT KETetapan PAKAR DAERAH M. UPTD 01/05/2024 - 31/05/2024		NO. KOHIR 1940	
Nama Badan / Merek Usaha : PARKIR " BANDARA KUALA NAMA/ INTERNATIONAL AIRPORT "					
Alamat : KAWASAN BANDARA KNSIA KUALA NAMA/ PASAR K'YUALA NAMA - BERINGIN					
No. P. W. P. D : P.2.001.7005.09.08					
No. Ura. Ura. :					
Rata-rata Penerimaan Tarif/tahun : 30 Hari Sederah SKPD dibayarkan					
NO	KD BERKINING	JENIS PAKAR DAERAH	JUMLAH		
	4110702	PAKAR PROGRESIST			
Jumlah Penerimaan Pajak Pokok			415.477.434,00		
Jumlah Penerimaan Pajak Tambahan			0,00		
Penerimaan Kewajiban, Pengurangan, Denda Pajak			0,00		
Jumlah Pajak Terutang			415.477.434,00		
[Dengan Hasil / Jumlah rates yang sudah lama jasa empur rates pajak pokok ribse empur rates jasa empur Rates Bagaik					
PERHATIAN 1. Penerimaan dilakukan setelah diterimanya Penyerahan Bagaik. Kab. Deli Serdang. 2. Penerimaan harus menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 3. Penerimaan harus menggunakan SKPD, apabila SSPD telah diterbitkan/validasi dan Register/urutan tanda BIKP. 4. Penerimaan harus menggunakan SKPD, apabila SSPD telah diterbitkan/validasi dan Register/urutan tanda BIKP. 5. Penerimaan harus menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dengan menggunakan Penerimaan Pajak Pokok dan sanksi administrasi. 6. Penerimaan harus menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dengan menggunakan Penerimaan Pajak Pokok dan sanksi administrasi. 7. Apabila dalam SKPD dan surat ada hal yang belum dimengerti harap segera datang ke kantor Bagaik Kabupaten Deli Serdang, setiap hari jam kerja.					



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

3. Pengembangan pembayaran Pajak dengan menggunakan elektronifikasi Pajak Daerah yaitu dengan pembayaran memakai Qris



4. Melaksanakan Penagihan Piutang PBB-P2 dengan melakukan kegiatan pemasangan Stiker PBB-P2 ke lokasi objek pajak yang terdapat piutang pajak PBB-P2

INTENSIFIKASI PBB P2

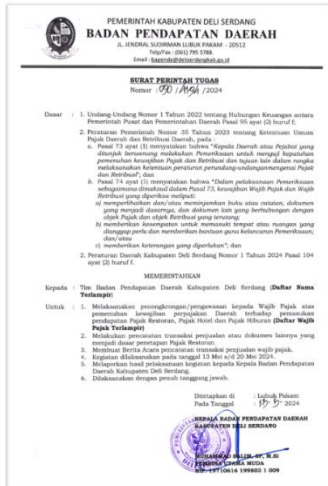
4. KEGIATAN PEMASANGAN STIKER PBB P2



5. Melaksanakan Penongkrongan/pengawasan kepada Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah terhadap pemasukan pendapatan PBJT Makanan dan/atau Minuman, PBJT Jasa Perhotelan dan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan.



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024



Uncle Sam's Cafe & Resto



4 Fingers



RM. Srikandi Kalasan



RM. Sederhana Cemara



6. Melakukan pengawasan melalui pemasangan alat rekam transaksi online/tapping box pada Wajib Pajak. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan survei terhadap objek pajak sebelum pemasangan alat rekam tapping box.





LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

7. Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Opsen PKB dan Opsen BBNKB antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Opsen PKB/BBNKB.



8. Melakukan kegiatan pemberian pengurangan Pokok Piutang dan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 Kabupaten Deli Serdang





LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

9. Melaksanakan Penandatanganan Surat Kuasa Khusus (SKK) dan memberikan bantuan hukum Non Litigasi untuk Penagihan Piutang PBB-P2 bersama Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli



10. Melaksanakan kegiatan proses pemetaan PBB-P2 by Aplikasi Gis-El



11. Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Bank Sumut terkait pengembangan Kanal Pembayaran BPHTB pada Bank Sumut dan BRI





LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

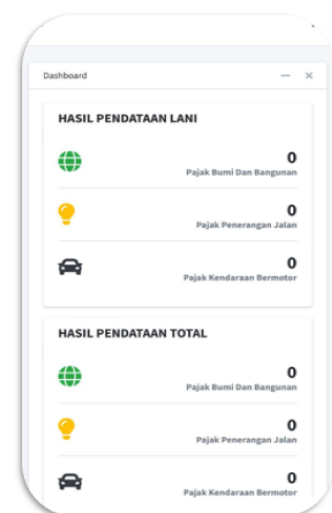
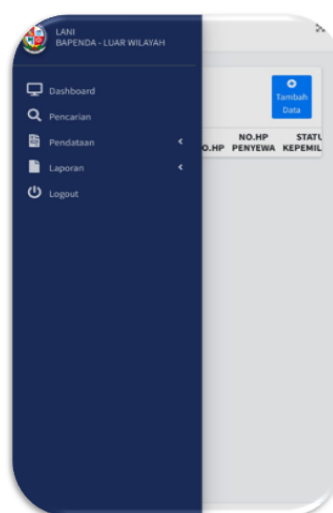
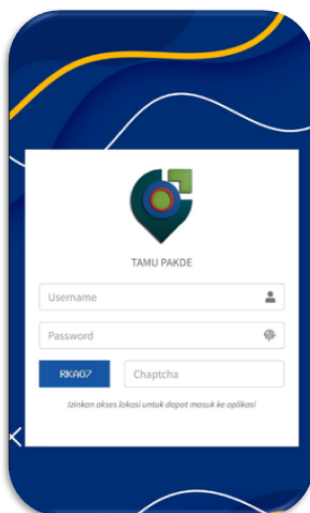
12. Pengembangan sistem aplikasi *e-Padi* dalam rangka Pendataan Pemutakhiran Pajak Daerah (Tamu Pakde) dari sektor PBB-P2, PBJT atas Tenaga Listrik, Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Proses Kegiatan Penyusunan Aplikasi Opsen PKB, BBNKB, PPJ dan PBB



DAFTAR HADIR			
1. Pagi, 2. Pagi, 3. Pagi, 4. Pagi, 5. Pagi, 6. Pagi, 7. Pagi, 8. Pagi, 9. Pagi, 10. Pagi, 11. Pagi, 12. Pagi, 13. Pagi, 14. Pagi, 15. Pagi, 16. Pagi, 17. Pagi, 18. Pagi, 19. Pagi, 20. Pagi			
ACARA	1. Pagi, 2. Pagi, 3. Pagi, 4. Pagi, 5. Pagi, 6. Pagi, 7. Pagi, 8. Pagi, 9. Pagi, 10. Pagi, 11. Pagi, 12. Pagi, 13. Pagi, 14. Pagi, 15. Pagi, 16. Pagi, 17. Pagi, 18. Pagi, 19. Pagi, 20. Pagi		
TANGGAL	1. Pagi, 2. Pagi, 3. Pagi, 4. Pagi, 5. Pagi, 6. Pagi, 7. Pagi, 8. Pagi, 9. Pagi, 10. Pagi, 11. Pagi, 12. Pagi, 13. Pagi, 14. Pagi, 15. Pagi, 16. Pagi, 17. Pagi, 18. Pagi, 19. Pagi, 20. Pagi		
WAKTU	1. Pagi, 2. Pagi, 3. Pagi, 4. Pagi, 5. Pagi, 6. Pagi, 7. Pagi, 8. Pagi, 9. Pagi, 10. Pagi, 11. Pagi, 12. Pagi, 13. Pagi, 14. Pagi, 15. Pagi, 16. Pagi, 17. Pagi, 18. Pagi, 19. Pagi, 20. Pagi		
DAFTAR HADIR	1. Pagi, 2. Pagi, 3. Pagi, 4. Pagi, 5. Pagi, 6. Pagi, 7. Pagi, 8. Pagi, 9. Pagi, 10. Pagi, 11. Pagi, 12. Pagi, 13. Pagi, 14. Pagi, 15. Pagi, 16. Pagi, 17. Pagi, 18. Pagi, 19. Pagi, 20. Pagi		
NO	NAMA	JABATAN/STATUS	TANDA TANGAN
1	1. Pagi	1. Pagi	1. Pagi
2	2. Pagi	2. Pagi	2. Pagi
3	3. Pagi	3. Pagi	3. Pagi
4	4. Pagi	4. Pagi	4. Pagi
5	5. Pagi	5. Pagi	5. Pagi
6	6. Pagi	6. Pagi	6. Pagi
7	7. Pagi	7. Pagi	7. Pagi
8	8. Pagi	8. Pagi	8. Pagi
9	9. Pagi	9. Pagi	9. Pagi
10	10. Pagi	10. Pagi	10. Pagi
11	11. Pagi	11. Pagi	11. Pagi
12	12. Pagi	12. Pagi	12. Pagi
13	13. Pagi	13. Pagi	13. Pagi
14	14. Pagi	14. Pagi	14. Pagi
15	15. Pagi	15. Pagi	15. Pagi
16	16. Pagi	16. Pagi	16. Pagi
17	17. Pagi	17. Pagi	17. Pagi
18	18. Pagi	18. Pagi	18. Pagi
19	19. Pagi	19. Pagi	19. Pagi
20	20. Pagi	20. Pagi	20. Pagi

TAMPILAN APLIKASI PENDATAAN E-PADI



13. Menyelenggarakan GEBYAR RELAKSASI PBB-P2 Tahun 2024 dengan memberikan kebijakan fiskal sebagai berikut :
- Diskon Pokok Pajak PBB-P2 50% : tahun 1994 sd tahun 2013
- Diskon Pokok Pajak PBB-P2 40% : tahun 2014 sd tahun 2019
- Diskon Pokok Pajak PBB-P2 10% : tahun 2020 sd tahun 2023
- dan PENGHAPUSAN DENDA mulai dari Tahun 1994 sampai dengan 2024, Periode pembayaran sd 13 Desember 2024



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

Peraturan Bupati Deli Serdang No 36 Tahun 2024 Tentang Pemberian Pengurangan Pokok Piutang Dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan



#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK

P200

bapenda

GEBYAR PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

RELAKSASI PBB-P2 TAHUN 2024

DISKON POKOK PAJAK PBB -P2 :

- DISKON 50%**
Masa Pajak 1994 s.d 2013
- DISKON 40%**
Masa Pajak 2014 s.d 2019
- DISKON 10%**
Masa Pajak 2020 s.d 2023

& PENGHAPUSAN DENDA 100%

PERIODE PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN 13 DESEMBER 2024

MULAI DARI TAHUN 1994 - 2024

PEMBAYARAN PBB-P2 DAPAT MELALUI KANTOR CAMAT/UPT BAPENDA DELI SERDANG, BANK SUMUT, DAN MERCHANT-MERCHANT RESMI LAINNYA :

SUMUT **Indomaret** **DANA** **tokopedia** **gopay**
Ayamart **OVO** **Shopee** **Bukalapak**

Gunakan Aplikasi e-Paid Mobile Untuk Melakukan Pembayaran PBB-P2 dan Pajak Lainnya

SCAN QR CODE

Agar Segera Bayar PBB-P2 Anda dan Manfaatkan Program Ini

https://bapenda.delserdangkab.go.id **@bapenda.kab.delserdang** **@bapenda.delserdang** **BAPENDA KAB. DELI SERDANG**



3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atau penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
						(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
1	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	100%	66,82%	66,82%	29.207.677.308	24.291.108.055	83,17 %	-24,46 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 poin	82,50 poin	100,61 %	4.883.357.862	4.215.479.948	86,32 %	14,20 %
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	72 poin	64,83 poin	90,04 %	41.842.840.946	39.447.281.049	94,27 %	-4,70 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

Efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left[1 - \frac{\text{RAK ke } i / \text{RVK ke } i}{\text{PAK ke } i / \text{TVK ke } i} \right]}{n} \times 100\%$$

Sumber : PMK No. 249/PMK.02/2011

Keterangan :

E = Efisiensi

RAK = Realisasi Anggaran Keluaran

RVK = Realisasi Volume Keluaran

PAK = Pagu Anggaran Keluaran

TVK = Target Volume Keluaran

Maka, hasil pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) pada Bapenda :

$$\begin{aligned}
 E &= \frac{\left[1 - \frac{24.291.108.055 / 66,82}{29.207.677.308 / 100} \right] \times 100\% + \left[1 - \frac{4.215.479.948 / 82,50}{4.883.357.862 / 82} \right] \times 100\% + \left[1 - \frac{39.447.281.049 / 64,83}{41.842.840.946 / 72} \right] \times 100\%}{3} \\
 &= \frac{\left[1 - \frac{363.530.501}{292.076.773} \right] \times 100\% + \left[1 - \frac{51.096.727}{59.553.145} \right] \times 100\% + \left[1 - \frac{608.472.637}{581.150.569} \right] \times 100\%}{3} \\
 &= \frac{-24,46 + 14,20 + (-4,70)}{3} \\
 &= -4,98\%
 \end{aligned}$$



Khusus untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) rasio efisiensi juga dapat dilihat dari biaya pemerolehan PAD dibandingkan dengan jumlah realisasi penerimaan PAD, dengan formulasi :

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Tabel 3.11 Tabel Efisiensi Keuangan Daerah Otonom

KEMAMPUAN KEUANGAN	RASIO EFISIEN (%)	SUMBER DATA
Sangat Efisien	< 10	<i>Mahmudi (2010)</i>
Efisien	10 - 20	
Cukup Efisien	21 - 30	
Kurang Efisien	31 - 40	
Tidak Efisien	> 40	

Maka, rasio efisiensi PAD Bapenda tahun 2024 khususnya dari sektor pajak daerah dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efisiensi PAD} &= \frac{67.953.869.052,-}{885.444.485.969,65} \\ &= 7,67 \%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa rasio efisiensi PAD Bapenda sebesar 7,67%. Dengan rasio <10% maka efisiensi keuangannya dapat dikategorikan **sangat efisien**.

3.1.8 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel berikut ini :



Tabel 3.13 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	66,82 %	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	66.82	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	100	Menunjang Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	80	Menunjang Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	50	Menunjang Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100	Menunjang Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak	66,32	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	131,18	Menunjang Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	78,94	Menunjang Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	97,65	Menunjang Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	46,90	Menunjang Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	32,01	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	55,86	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	155	Menunjang Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Penendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	110,09	Menunjang Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	48,18	Menunjang Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	66,67	Menunjang Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	90,04 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LHE AKIP	90,04		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95,24	Menunjang Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2 dan Stimulus untuk Pencapaian Sasaran Strategis 1
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	138,46	Menunjang Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	100,61 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,61		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100		
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas	-	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum Perangkat Daerah	100		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	73,91	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	164,81	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	128,57	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	21,56	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94,57	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100		
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	62,50	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	140	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemeliharaan Kendaraan Operasional untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58,24	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemeliharaan Peralatan untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
				Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	100	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemeliharaan Aplikasi untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	126	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemeliharaan Sarpras untuk Mendukung Pencapaian Sasaran

Sumber : Badan Pendapatan Daerah



LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

Sasaran strategis tahun 2024 ada yang sudah tercapai dan ada yang tidak tercapai. Dari 2 (dua) sasaran tersebut capaian tertinggi adalah sasaran ke-2, meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja, yang didukung 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan capaian indikator sasaran untuk Indeks Kepuasan Masyarakat telah tercapai 100,61% sedangkan untuk Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah tercapai 90,04%.

Sasaran yang tidak tercapai yaitu meningkatnya penerimaan pajak daerah yang didukung 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Berbagai upaya telah dilakukan melalui penongkrongan/pengawasan kepada Wajib Pajak terhadap pemasukan pendapatan PBJT Makanan dan/atau Minuman, PBJT Jasa Perhotelan dan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, pemasangan alat rekam transaksi online/tapping box, SKK Kejaksaaan untuk Penagihan Piutang PBB-P2, pengembangan sistem aplikasi e-Padi dalam rangka pendataan pemutakhiran Pajak Daerah (Tamu Pakde), pelayanan yang cepat, mudah, transparan, berkualitas dan terdigitalisasi, pembayaran pajak memakai Qris, pemasangan stiker PBB P-2 ke lokasi objek pajak yang terdapat tunggakan, pemberian pengurangan pokok piutang dan penghapusan sanksi administratif PBB P-2, gebyar PBB untuk memberikan motivasi dan pemberian reward, pemetaan PBB-P2 dengan Aplikasi Gis-El, PKS dengan Bank Sumut untuk pembayaran BPHTB, gebyar relaksasi pajak PBB-P2 dan penghapusan denda PBB-P2.



3.2 Realisasi Anggaran

Untuk realisasi anggaran merupakan serapan anggaran pelaksanaan kegiatan yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja. Dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.14 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Anggaran	% Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	46.726.198.808	43.662.760.997	93,44	95,33
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.192.764	36.399.000	88,36	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.801.648.182	39.410.882.049	94,28	100
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.250.000	0	0	100
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.064.205.790	1.662.187.723	80,52	100
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	229.348.000	200.143.000	87,27	100
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.286.803.072	1.226.050.792	95,28	100
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.234.751.000	1.127.098.433	91,28	100
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	29.207.677.308	24.291.108.055	83,17	66,82
2.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	29.207.677.308	24.291.108.055	83,17	100

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

Terlihat pada tabel di atas, bahwa serapan anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran ke-2 meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 93,44% dengan capaian kinerja 95,33%. Sedangkan untuk pencapaian kinerja sasaran ke-1 meningkatnya penerimaan pajak daerah melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah serapan anggarannya sebesar 83,17% dengan capaian kinerja 66,82%.



BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah ini disusun, sebagai wujud pertanggungjawaban kami terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun anggaran 2024. Laporan ini menggambarkan capaian dari dua sasaran strategis Bapenda dengan kategori sangat tinggi dan kategori sedang.

Kami menyadari meskipun berbagai upaya telah dilakukan, namun masih terdapat faktor penghambat keberhasilan kinerja yang dihadapi. Untuk itu, perlu langkah-langkah upaya perbaikan kedepan seperti :

1. Meningkatkan penggalian potensi pajak daerah dengan pendataan ke lapangan serta pemutakhiran pajak daerah;
2. Meningkatkan kegiatan pengawasan dan penilaian dengan pemantauan data dan uji kepatuhan wajib pajak;
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penagihan piutang;
4. Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran, sosialisasi pajak daerah dan literasi kepada masyarakat tentang pajak daerah;
5. Meningkatkan pelayanan administrasi pajak daerah maupun pembayaran serta mengembangkan chanel pembayaran.

Harapan kami, laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan akuntabel kepada seluruh pihak yang berkepentingan, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan yang lebih baik.

Lubuk Pakam, Februari 2025
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710616 199803 1 009



BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah ini disusun, sebagai wujud pertanggungjawaban kami terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun anggaran 2024. Laporan ini menggambarkan capaian dari dua sasaran strategis Bapenda dengan kategori sangat tinggi dan kategori sedang.

Kami menyadari meskipun berbagai upaya telah dilakukan, namun masih terdapat faktor penghambat keberhasilan kinerja yang dihadapi. Untuk itu, perlu langkah-langkah upaya perbaikan kedepan seperti :

1. Meningkatkan penggalian potensi pajak daerah dengan pendataan ke lapangan serta pemutakhiran pajak daerah;
2. Meningkatkan kegiatan pengawasan dan penilaian dengan pemantauan data dan uji kepatuhan wajib pajak;
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penagihan piutang;
4. Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran, sosialisasi pajak daerah dan literasi kepada masyarakat tentang pajak daerah;
5. Meningkatkan pelayanan administrasi pajak daerah maupun pembayaran serta mengembangkan chanel pembayaran.

Harapan kami, laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan akuntabel kepada seluruh pihak yang berkepentingan, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan yang lebih baik.

Lubuk Pakam, Februari 2025

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**



MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710616 199803 1 009



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. HENDRA WIJAYA**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. M. ALI YUSUF SIREGAR**
Jabatan : **BUPATI DELI SERDANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lubuk Pakam,

Januari 2024

Pihak Kedua



H. M. ALI YUSUF SIREGAR

Pihak Pertama



Drs. HENDRA WIJAYA

NIP. 19691213 199010 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Poin
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	72 Nilai

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37.225.024.696	APBD
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	24.663.058.029	APBD

Lubuk Pakam, Januari 2024



Bupati Deli Serdang

H. M. ALI YUSUF SIREGAR



Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Deli Serdang

HENDRA WIJAYA
NIP. 213 199010 1 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. WIRIYA ALRAHMAN MM**
Jabatan : **Pj. BUPATI DELI SERDANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ir. WIRIYA ALRAHMAN MM

Lubuk Pakam,
Pihak Pertama

2024



MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si
NIP. 19710616 199803 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Poin
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	72 Nilai

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	46.726.198.808	P.APBD
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	29.207.677.308	P.APBD

Lubuk Pakam,

2024

Bupati Deli Serdang

Ir. WIRIYA ALRAHMAN MM



Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Deli Serdang

MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si
NIP. 19710616 199803 1 009



MATRIKS RENSTRA

MATRIKS RENSTRA
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN SKPD
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Data Capaian pada tahun Awal	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja PD Penanggungja wab	Lokasi dan Kelompok sasaran
								Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)			
I	Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	-	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah Asli	-	-	-	-	5%		5%		5%		5%		5%		25%	Kepala Badan	Kab. Deli Serdang
		Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	-	-	-	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Kepala Badan	Kab. Deli Serdang
				5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah		100%	10567	100%	13499	100%	16180	100%	16398	100%	16758	100%	Kepala Badan	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah		100%	10567	100%	13499	100%	16180	100%	16398	100%	16758	100%	Kabid Pajak Daerah, Kabid PBB, Kabid BPHTB dan Kabid Renbang	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Data Potensi Pajak Daerah		2639 WP	0	2954 WP	0	0	0	3368 WP	27	3617 WP	28		Kasubbid Perencanaan Pendapatan	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kebijakan Pajak Daerah yang disusun		4 Kebijakan	0	5 Kebijakan	574	7 Kebijakan	58	7 Kebijakan	63	7 Kebijakan	65		Kasubbid Pengembangan Pendapatan	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarnyaan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Peserta Penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah			0	60 Orang	5085	500 Orang	273	500 Orang	353	500 Orang	364		Kasubbid Perencanaan Pendapatan	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		5 Jenis	122	6 Jenis	0			8 Jenis	440	9 Jenis	453		Kasubbid Pajak Daerah, PBB, BPHTB dan Renbang	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.05	Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Daerah Baru yang Terdata		338 WP	3708	363 WP	0	363 WP	6199	438 WP	6920	481 WP	7,128		Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah		3 Aplikasi	221	4 Aplikasi	578	4 Aplikasi	646	4 Aplikasi	217	4 Aplikasi	224		Kasubbid Pengembangan Pendapatan	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.07	Penerimaan Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak PBB yang Terdata dan Dinilai		15953 OP PBB	0	16112 OP PBB	887	16134 OP PBB	685	17375 OP PBB	564	18195 OP PBB	581		Kasubbid Pendataan dan Penilaian PBB	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah WP Pajak Daerah yang Ditetapkan		2456 WP	554	2456 WP	6244	2491 WP	114	2493 WP	675	2516 WP	695		Kasubbid Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah WP yang Terlayani		34031 WP	0	35119 WP	0	35119 WP	98	38355 WP	130	40175 WP	134		Kasubbid Penagihan dan Pembukuan BPHTB	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Verifikasi dan Validasi		18078 WP	629	18985 WP	0	18985 WP	623	20980 WP	669	21980 WP	689		Kasubbid Verifikasi dan Validasi BPHTB	Kab. Deli Serdang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Data Capaian pada tahun Awal	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja PD Penanggungja wab	Lokasi dan Kelompok sasaran
								Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)			
				5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah WP yang Tertagih		418945 WP	5219	442139 WP	131	449671 WP	6272	505617 WP	5978	537939 WP	6,157		Kasubbid Penagihan dan Pembukuan Pajak PBB	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah SPPT dan WP Keberatan		411377 WP	0	431975WP	0	431975 WP	591	466975 WP	25	486975 WP	26		Kasubbid Penetapan dan Keberatan PBB	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Data Evaluasi & Pelaporan Pajak Daerah		12 Bulan	114	12 Bulan	0	12 Bulan	544	12 Bulan	105	12 Bulan	108		Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Data Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi		12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	76	12 Bulan	232	12 Bulan	107		Kasubbid Retribusi Daerah & Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintahan Propinsi	Kab. Deli Serdang
II	Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel	-	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	77 poin		78 poin		79 poin		80 poin		81 poin	-	81 poin	Kepala Badan	Kab. Deli Serdang
		Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	77 poin		78 poin		79 poin		80 poin		81 poin	-	81 poin	Kepala Badan	Kab. Deli Serdang
				5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	3623	100%	3427	100%	5035	100%	5503	100%	5907	100%	Kepala Badan	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	22	100%	75	100%	194	100%	194	100%	200	100%	Sekretaris	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas		110 Stel	22	0	75	100 Stel	194	110 Stel	194	110 Stel	200		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Kedinasan		100%	1738	100%	1296	100%	2421	100%	2643	100%	2722	100%	Sekretaris	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Alat-alat Listrik dan Penerangan Kantor		3 Jenis	2	3 Jenis	14	2 Jenis	13	3 Jenis	15	3 Jenis	15		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10 Jenis	501	10 Jenis	157	10 Jenis	503	10 Jenis	496	10 Jenis	511		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		17 Jenis	397	17 Jenis	339	17 Jenis	346	17 Jenis	362	17 Jenis	373		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan		4 Jenis	213	4 Jenis	22	5 Jenis	147	5 Jenis	181	5 Jenis	186		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Data Capaian pada tahun Awal	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja PD Penanggungja wab	Lokasi dan Kelompok sasaran
								Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)			
				5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4020 eks	45	4020 eks	53	4020 eks	53	4020 eks	53	4020 eks	55		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bahan Makanan dan Minuman Tamu		7 jenis	97	7 jenis	16	7 jenis	55	7 jenis	51	7 jenis	53		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kunjungan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		815 OH	483	815 OH	695	815 OH	1305	815 OH	1485	815 OH	1,530		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah		100%	8	100%	0	100%	373	100%	560	100%	816	100%	Sekretaris	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan			0		0			2 Unit	54	2 Unit	300		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel		5 Jenis	8	5 Jenis	0	5 Jenis	373	5 Jenis	332	5 Jenis	342		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								8 Unit	174	8 Unit	174		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	1230	100%	1151	100%	1129	100%	1248	100%	1285	100%	Sekretaris	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengadaan Materai		1400 Buah	8	2000 Buah	14	2000 Buah	20	2000 Buah	20	2000 Buah	21		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telepon/Internet, Air dan Listrik		3 Jenis	731	3 Jenis	554	3 Jenis	556	3 Jenis	577	3 Jenis	594		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		50 Unit	103	50 Unit	28	180 Unit	138	50 Unit	253	50 Unit	261		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Petugas Kebersihan dan Keamanan		130 OB	388	130 OB	555	130 OB	415	130 OB	398	130 OB	410		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		90%	625	90%	905	100%	920	90%	858	90%	884	90%	Sekretaris	Kab. Deli Serdang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Data Capaian pada tahun Awal	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja PD Penanggungja wab	Lokasi dan Kelompok sasaran
								Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)			
				5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara		20 Unit	595	20 Unit	674	20 Unit	748	21 Unit	782	21 Unit	805		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor yang Terpelihara		1100 m ²	30	1100 m ²	174	1100 m ²	172	1100 m ²	58	1100 m ²	60		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpelihara		3 Jenis	0	3 Jenis	57			3 Jenis	18	3 Jenis	19		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
			Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah					70 poin		72 poin		74 poin		76 poin		78 poin		78 poin	Kepala Badan	Kab. Deli Serdang
				5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	38339	100%	37571	100%	38857	100%	39765	100%	40958	100%	Kepala Badan	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	0	100%	0	100%	53	100%	68	100%	70	100%	Sekretaris	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan		2 Jenis	0	2 Jenis	0	2 Jenis	32	2 Jenis	40	2 Jenis	41		Kasubbag Program	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen / Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah		1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	22	1 Dokumen	28	1 Dokumen	29		Kasubbag Program	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	38339	100%	37571	100%	38804	100%	39697	100%	40888	100%	Sekretaris	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		135 OB	37896	104 OB	37108	132 OB	38070	135 OB	39000	135 OB	40,170		Kasubbag Keuangan	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan		135 OB	371	135 OB	218	132 OB	445	132 OB	411	132 OB	423		Kasubbag Keuangan	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		45 Set	72	45 Set	245	45 Set	289	45 Set	286	45 Set	295		Kasubbag Keuangan	Kab. Deli Serdang



MATRIKS PERUBAHAN RENSTRA

PERUBAHAN MATRIKS RENSTRA
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN SKPD
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
INDIKATOR KEMENDAGRI 050/5889

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN-2022		TAHUN-2023		TAHUN-2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
								Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
I	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		Persentase Peningkatan Penerimaan PAD					5%		5%		5%		5%		Bapenda	Kab. Deli Serdang
		Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah					100%		100%		100%		100%		Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02:04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100%	100%	15,780	100%	16,455	100%	18,253	100%	18,253	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	100%	15,780	100%	16,455	100%	18,253	100%	18,253	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	100%	-	0	2 Dokumen	24	2 Dokumen	26	2 Dokumen	26	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	100%	8 Dokumen	57	10 Dokumen	62	10 Dokumen	69	10 Dokumen	69	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100%	2 Laporan	442	8 Laporan	448	8 Laporan	498	8 Laporan	498	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100%	35 Unit	339	33 Unit	440	12 Unit	488	12 Unit	488	Bapenda	Kab. Deli Serdang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN-2022		TAHUN-2023		TAHUN-2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
								Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
				5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	100%	17307 Laporan	6,078	17430 Laporan	6,864	17547 Laporan	7,620	17547 Laporan	7,620	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100%	19800 Laporan	391	20725 Laporan	290	21550 Laporan	322	21550 Laporan	322	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	100%	60 Objek Pajak	1,219	2500 Objek Pajak	553	5000 Objek Pajak	614	5000 Objek Pajak	614	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100%	455987 Dokumen	115	456587 Dokumen	675	517187 Dokumen	749	517187 Dokumen	749	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100%	62540 Layanan	89	63560 Layanan	121	64631 Layanan	135	64631 Layanan	135	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	100%	50873 Dokumen	546	56883 Dokumen	658	62949 Dokumen	730	62949 Dokumen	730	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100%	473835 Dokumen	5,614	505617 Dokumen	5,978	537939 Dokumen	6,636	537939 Dokumen	6,636	Bapenda	Kab. Deli Serdang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN-2022		TAHUN-2023		TAHUN-2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
								Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
				5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100%	50 Dokumen	535	30 Dokumen	26	20 Dokumen	29	20 Dokumen	29	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100%	17083 Dokumen	279	18051 Dokumen	82	19098 Dokumen	90	19098 Dokumen	90	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100%	384 Laporan	74	384 Laporan	232	384 Laporan	246	384 Laporan	246	Bapenda	Kab. Deli Serdang
II	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat				79%		80%		81%		81%		Bapenda	Kab. Deli Serdang
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat				79%		80%		81%		81%		Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat		79 Poin	5,767	80 Poin	5,593	81 Poin	5,873	81 Poin	5,873	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100%	100%	194	100%	75	100%	78	100%	78	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.05.02	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	4 Paket	194	1 Paket	75	1 Paket	78	1 Paket	78	Bapenda	Kab. Deli Serdang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN-2022		TAHUN-2023		TAHUN-2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
								Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
				5.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	100%	100%	2,927	100%	2,607	100%	2,738	100%	2,738	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	3 Paket	14	4 Paket	15	4 Paket	16	4 Paket	16	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	19 Paket	670	21 Paket	470	20 Paket	493	20 Paket	493	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	19 Paket	346	34 Paket	356	34 Paket	373	34 Paket	373	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	9 Paket	188	9 Paket	180	9 Paket	189	9 Paket	189	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100%	4020 Dokumen	53	4020 Dokumen	53	4050 Dokumen	55	4050 Dokumen	55	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	12 Laporan	55	12 Laporan	51	12 Laporan	54	12 Laporan	54	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	84 Laporan	1,602	84 Laporan	1,483	84 Laporan	1,557	84 Laporan	1,557	Bapenda	Kab. Deli Serdang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN-2022		TAHUN-2023		TAHUN-2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
								Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
				5.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100%	100%	645	100%	807	100%	848	100%	848	Bapenda	Kab. Deli Serdang
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100%	1 Unit	281	1 Unit	295	1 Unit	310	1 Unit	310	Bapenda	Kab. Deli Serdang
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%	1 Unit	275	1 Unit	300	2 Unit	315	2 Unit	315	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	143 Unit	370	154 Unit	332	160 Unit	349	160 Unit	349	Bapenda	Kab. Deli Serdang
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	-	0	8 Unit	175	10 Unit	184	10 Unit	184	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan	100%	100%	1,083	100%	1,245	100%	1,307	100%	1,307	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	500 Laporan	10	375 Laporan	17	390 Laporan	18	390 Laporan	18	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	25 Laporan	556	24 Laporan	577	24 Laporan	606	24 Laporan	606	Bapenda	Kab. Deli Serdang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN-2022		TAHUN-2023		TAHUN-2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
								Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
				5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	206 Laporan	143	98 Laporan	253	150 Laporan	266	150 Laporan	266	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	40 Laporan	374	42 Laporan	398	45 Laporan	417	45 Laporan	417	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya	100%	90%	917	90%	858	90%	901	90%	901	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	20 Unit	746	21 Unit	782	21 Unit	821	21 Unit	821	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100%	1 Unit	171	1 Unit	58	1 Unit	61	1 Unit	61	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100%	-	-	30 Unit	18	47 Unit	19	47 Unit	19	Bapenda	Kab. Deli Serdang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN-2022		TAHUN-2023		TAHUN-2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
								Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
			Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	5.02:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah		74 Poin	39,099	76 Poin	38,283	78 Poin	40,198	78 Poin	40,198	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran	100%	100%	41	100%	69	100%	72	100%	72	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	5 Dokumen	25	5 Dokumen	40	5 Dokumen	43	5 Dokumen	43	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	2 Laporan	16	2 Laporan	28	2 Laporan	29	2 Laporan	29	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%	100%	39,058	100%	38,215	100%	40,125	100%	40,125	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1428 Orang/Bulan	38,367	1680 Orang/Bulan	37,477	1470 Orang/Bulan	39,351	1470 Orang/Bulan	39,351	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	130 Dokumen	444	130 Dokumen	452	140 Dokumen	475	140 Dokumen	475	Bapenda	Kab. Deli Serdang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN-2022		TAHUN-2023		TAHUN-2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
								Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
				5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	1 Laporan	247	1 Laporan	286	1 Laporan	300	1 Laporan	300	Bapenda	Kab. Deli Serdang



REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
LAPORAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH
TA 2024**

NO	JENIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH	P. APBD 2024	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2024	%	CARA PERHITUNGAN	HASIL
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7
1.	PBJT Jasa Perhotelan	10.500.000.000,00	11.817.536.110,55	112,55	$\frac{11.817.536.110,55}{10.500.000.000,00} \times 100\%$	= 112,55%
2.	PBJT Makanan dan/atau Minuman	52.500.000.000,00	57.224.632.402,00	109,00	$\frac{57.224.632.402,00}{52.500.000.000,00} \times 100\%$	= 109,00%
3.	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	10.000.000.000,00	8.351.100.444,00	83,51	$\frac{8.351.100.444,00}{10.000.000.000,00} \times 100\%$	= 83,51%
4.	PBJT Tenaga Listrik	310.285.326.714,00	229.029.607.441,00	73,81	$\frac{229.029.607.441,00}{310.285.326.714,00} \times 100\%$	= 73,81%
5.	PBJT Jasa Parkir	16.000.000.000,00	8.080.730.453,00	50,50	$\frac{8.080.730.453,00}{16.000.000.000,00} \times 100\%$	= 50,50%
6.	Pajak Reklame	21.000.000.000,00	13.835.204.800,00	65,88	$\frac{13.835.204.800,00}{21.000.000.000,00} \times 100\%$	= 65,88%
7.	Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan	16.000.000.000,00	2.798.417.113,00	17,49	$\frac{2.798.417.113,00}{16.000.000.000,00} \times 100\%$	= 17,49%
8.	Pajak Air Tanah	20.700.000.000,00	13.948.331.086,00	67,38	$\frac{13.948.331.086,00}{20.700.000.000,00} \times 100\%$	= 67,38%
9.	Pajak Sarang Burung Walet	7.500.000.000,00	8.100.000,00	0,11	$\frac{8.100.000,00}{7.500.000.000,00} \times 100\%$	= 0,11%
10.	PBB Perkotaan dan Pedesaan	574.937.181.720,00	288.352.635.568,00	50,15	$\frac{288.352.635.568,00}{574.937.181.720,00} \times 100\%$	= 50,15%
	- Pokok PBB Tahun Berjalan	319.131.659.665,00	261.482.238.116,00	81,94	$\frac{261.482.238.116,00}{319.131.659.665,00} \times 100\%$	= 81,94%
	- Pokok Piutang PBB	255.805.522.055,00	26.870.397.452,00	10,50	$\frac{26.870.397.452,00}{255.805.522.055,00} \times 100\%$	= 10,50%
11.	Pajak BPHTB	285.611.340.335,00	251.998.190.552,00	88,23	$\frac{251.998.190.552,00}{285.611.340.335,00} \times 100\%$	= 88,23%
	TOTAL PAJAK DAERAH	1.325.033.848.769,00	885.444.485.969,55	66,82	$\frac{885.444.485.969,55}{1.325.033.848.769,00} \times 100\%$	= 66,82%

Lubuk Pakam, 2025
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
MUBUKATEN DELI SERDANG


MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si
PEMINTA TAMA MUDA
NIP. 19616 199803 1 009



NILAI IKM BADAN PENDAPATAN DAERAH

LAPORAN
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2024

TRIWULAN	NILAI IKM
1	80.00
2	85.75
3	94.00
4	70.25
IKM TAHUN 2024	82.50

Pilih Jenis Pelayanan

SEMUA PELAYANAN

Dari Tanggal

2024-01-01

Sampai Tanggal

2024-12-31

Filter Cetak

Nilai IKM

82.5

Indeks Kepuasan
Masyarakat



Mutu Pelayanan

Baik

Indeks Kepuasan
Masyarakat



NPR Terimbang

3.3

Indeks Kepuasan
Masyarakat



Jumlah Responden

467

Indeks Kepuasan
Masyarakat



Februari 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Deli Serdang

Muhammad Sahim, SP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710616 199803 1 009



LHE SAKIP BADAN PENDAPATAN DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

INSPEKTORAT

Jalan Mawar Nomor 06 Lubuk Pakam Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20514
Telepon (061)-7951646 Faksimile (061)-7951646
Pos-el: inspektoratdeliserdang@gmail.com, Laman: <https://inspektorat.deliserdangkab.go.id>

Lubuk Pakam, 22 Juli 2024

Nomor : 700.1.2.1 /LHE. Akip. 184 / INSP / 2024

Lampiran :

Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

Kepada Yth,

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
di-

Lubuk Pakam

Tim Evaluasi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 dengan berpedoman pada Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam melakukan evaluasi SAKIP adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Deli Serdang Nomor : 800.1.11.1/DD/127/2024 tanggal 12 Juni 2024.

b. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang cakap, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik,

indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat" dengan target tahun 2024 sebesar "81" sedangkan capaian kinerja tersebut pada tahun 2023 sebesar "81,87".

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 telah melakukan evaluasi implementasi SAKIP pada perangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah belum menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- b. Perangkat Daerah belum memanfaatkan secara maksimal hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang disampaikan oleh Inspektorat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

4. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melengkapi informasi penanggung jawab kegiatan dengan menjabarkan pencapaian kinerja mulai dari level eselon 2 secara berjenjang.
- 2) Menetapkan target PK 2024 yang realistis dan menantang dengan membandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.
- 3) Melengkapi pengukuran kinerja dengan data dukung pencapaian kinerja secara berjenjang sehingga tergambar validitas pengukuran capaian kinerja.
- 4) Melengkapi laporan kinerja dengan perbandingan capaian penerimaan pajak baik level provinsi maupun nasional.
- 5) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dan informasi dalam laporan kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai
- 6) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan memanfaatkan secara maksimal hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

5. PENUTUP

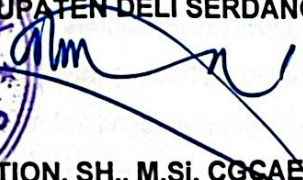
a. Simpulan

Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang masuk dalam kategori baik dengan predikat B (64,83). Meski sudah mendapat kategori baik, namun masih ada beberapa komponen yang harus diperbaiki, seperti Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

b. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP Yang Lebih Baik.

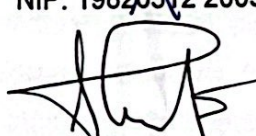
Demikian disampaikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Apresiasi dan Penghargaan atas upaya dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

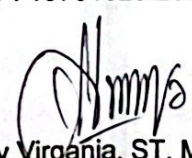
Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

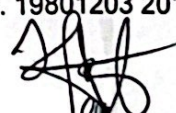

MENGETAHUI :
INSPEKTUR KABUPATEN DELI SERDANG

H. EDWIN NASUTION, SH., M.Si, CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741221 199803 1 010

TIM PEMERIKSA :


1. Gita Priscilla Pinem, SH, M.Hum
NIP. 19820312 200502 2 002


2. Ahmad Rifana Pasaribu, ST, M.Si
NIP. 19791028 200903 1 003


3. Lily Virgania, ST, M.Si
NIP. 19801203 201001 2 022


4. Jaka Pramana, S.Kom
NIP. 19910610 201505 1 001

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang
2. Arsip

SURAT MASUK	
NO. 15	AGENDA RENCANA
1993.01.15	1993.01.15
PELUANG	



TINDAK LANJUT LHE SAKIP TAHUN 2023

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
TINDAKLANJUT LHE AKIP 2023**

NO.	REKOMENDASI LHE AKIP INTERNAL 2023	TINDAK LANJUT
1	Melengkapi informasi penanggung jawab kegiatan dengan menjabarkan pencapaian kinerja mulai dari level eselon 2 secara berjenjang	Penyempurnaan Dokumen Rencana Aksi dengan menjabarkan pencapaian kinerja mulai dari eselon 2 secara berjenjang.
2	Menetapkan target PK 2024 yang realistis dan menantang dengan membandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya	Perubahan target PK 2024 yang realistis dan menantang dengan membandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.
3	Melengkapi pengukuran kinerja dengan data dukung pencapaian kinerja secara berjenjang sehingga tergambar validitas pengukuran capaian kinerja	Pengukuran kinerja per triwulan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dilengkapi dengan data dukung pencapaian kinerja secara berjenjang.
4	Melengkapi laporan kinerja dengan perbandingan capaian penerimaan pajak baik level provinsi maupun nasional.	Penyempurnaan laporan kinerja dengan perbandingan capaian penerimaan level provinsi dan nasional.
5	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dan informasi dalam laporan kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai	Hasil pengukuran kinerja setiap hari dimonitoring oleh atasan dan stakeholder yang awalnya manual laporan harian pajak daerah yang dibuat bendahara penerimaan ditingkatkan dengan penggunaan aplikasi pajak daerah yang secara realtime dapat dilihat perkembangan sekaligus rinciannya baik per jenis pajak, per kecamatan, bahkan sampai rincian objek masing-masing pajak daerah untuk menentukan strategi selanjutnya secara rutin dan terus-menerus.
6	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan memanfaatkan secara maksimal hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja	Seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan secara maksimal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja .

Lubuk Pakam,

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**


MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si
KEPALA UTAMA MUDA
 NIP. 19710616 199803 1 009

Tabel 2.4
Rencana Aksi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Anggaran	Output Sub Kegiatan	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	Persen	Trw 1 = 15 Trw 2 = 35 Trw 3 = 60 Trw 4 = 100	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	24.663.058.029									Kepala Badan Pendapatan Daerah
							Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.425.102.110	Persentase Peningkatan Data Potensi Pajak Daerah	Trw 1 = 18,75 % Trw 2 = 18,75 % Trw 3 = 18,75 % Trw 4 = 18,75 %					Kabid. Perencanaan dan Pengembangan
											Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	44.825.120	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = - Trw 4 = -	Fungsional di Renbang (Subbid. Perencanaan Pendapatan)
											Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	220.219.672	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Trw 1 = 2 Trw 2 = 2 Trw 3 = 3 Trw 4 = 3	Kasubbid Pengembangan Pendapatan
											Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	408.167.060	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Trw 1 = 2 Trw 2 = 2 Trw 3 = 2 Trw 4 = 2	Kasubbid Pengembangan Pendapatan
											Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	364.620.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Trw 1 = 3 Trw 2 = 3 Trw 3 = 3 Trw 4 = 3	Kasubbid Pengembangan Pendapatan
											Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2.274.679.590	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Trw 1 = 53 Trw 2 = 53 Trw 3 = 53 Trw 4 = 53	Kasubbid Pengembangan Pendapatan
											Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	90.453.520	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Trw 1 = 47 Trw 2 = 47 Trw 3 = 47 Trw 4 = 47	Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan
											Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	22.137.148	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Pemerintah Daerah	Trw 1 = 3 Trw 2 = 3 Trw 3 = 3 Trw 4 = 3	Kasubbid Pengembangan Pendapatan
							Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.129.629.860	Persentase Penerimaan 8 Sektor Pajak Daerah : 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Mineral 6. Pajak Parkir 7. Pajak Walet 8. Pajak Air Tanah	Trw 1 = 15 Trw 2 = 35 Trw 3 = 60 Trw 4 = 100					Kepala Bidang Pajak Daerah
											Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	7.081.379.860	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Trw 1 = 763 Trw 2 = 763 Trw 3 = 764 Trw 4 = 764	Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah
											Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Trw 1 = 5.250 Trw 2 = 5.250 Trw 3 = 5.250 Trw 4 = 5.250	Kasubbid. Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah
											Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	45.000.000	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan	Trw 1 = 31 Trw 2 = 31	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Anggaran	Output Sub Kegiatan	Target	Penanggung Jawab
							Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	13.484.450.985	Persentase Penerimaan Pajak PBB P2	Trw 1 = 15 Trw 2 = 35 Trw 3 = 60 Trw 4 = 100			Verifikasi	Trw 3 = 31 Trw 4 = 32	Fungsional di Bidang Pajak Daerah (Subbid Penetapan Pajak Daerah)
											Penetapan Wajib Pajak Daerah	3.250.000	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Trw 1 = 4.375 Trw 2 = 4.375 Trw 3 = 4.375 Trw 4 = 4.375	
											Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	375.510.800	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Trw 1 = 1.250 Trw 2 = 1.250 Trw 3 = 1.250 Trw 4 = 1.250	
											Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Trw 1 = 3.623 Trw 2 = 3.623 Trw 3 = 3.623 Trw 4 = 3.624	Kasubid Pendataan dan Penilaian PBB
											Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	18.000.000	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Trw 1 = 11.115 Trw 2 = 11.115 Trw 3 = 11.116 Trw 4 = 11.116	
											Penetapan Wajib Pajak Daerah	580.351.714	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Trw 1 = 124.921 Trw 2 = 124.922 Trw 3 = 124.922 Trw 4 = 124.922	
											Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	18.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Trw 1 = 5 Trw 2 = 5 Trw 3 = 5 Trw 4 = 5	
							Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	623.875.074	Persentase Penerimaan Pajak BPHTB Persentase Penerimaan Pajak PPJ	Trw 1 = 15 Trw 2 = 35 Trw 3 = 75 Trw 4 = 100 Trw 1 = 15 Trw 2 = 35 Trw 3 = 60 Trw 4 = 100					Kabid BPHTB, Retribusi dan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Propinsi
											Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	614.015.200	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Trw 1 = 5.542 Trw 2 = 5.542 Trw 3 = 5.542 Trw 4 = 5.543	Kasubbid Verifikasi dan Validasi BPHTB
											Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3.513.406	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Trw 1 = 5.542 Trw 2 = 5.542 Trw 3 = 5.542 Trw 4 = 5.543	Kasubbid Penagihan dan Pembukuan BPHTB
											Penagihan Pajak Daerah	751.468	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Trw 1 = 4.313 Trw 2 = 4.313 Trw 3 = 4.313 Trw 4 = 4.313	
											Pembinaan dan Pengawasan	5.595.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan	Trw 1 = 96	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Anggaran	Output Sub Kegiatan	Target	Penanggung Jawab
											Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Trw 2 = 96 Trw 3 = 96 Trw 4 = 96	BPHTB (Subbid Retribusi dan Bagi Hasil)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	Trw 1 = 82 Trw 2 = 82 Trw 3 = 82 Trw 4 = 82	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4.323.712.562									Kepala Badan Pendapatan Daerah
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.250.000	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Trw 1 = 25 % Trw 2 = 25 % Trw 3 = 25 % Trw 4 = 25 %					Sekretaris Badan
											Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	68.250.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = 1 Trw 4 = -	Kasubbag Umum
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.851.268.810	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Trw 1 = 25 % Trw 2 = 25 % Trw 3 = 25 % Trw 4 = 25 %					Sekretaris Badan
											Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.902.240	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1	Kasubbag Umum
											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	211.944.180	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 3 Trw 2 = 4 Trw 3 = 4 Trw 4 = 4	Kasubbag Umum
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	341.659.830	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 8 Trw 2 = 9 Trw 3 = 9 Trw 4 = 9	Kasubbag Umum
											Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	179.511.280	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Trw 1 = 1 Trw 2 = 2 Trw 3 = 2 Trw 4 = 2	Kasubbag Umum
											Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	52.921.440	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Trw 1 = 1.005 Trw 2 = 1.005 Trw 3 = 1.005 Trw 4 = 1.005	Kasubbag Umum
											Fasilitasi Kunjungan Tamu	51.259.840	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Trw 1 = 3 Trw 2 = 3 Trw 3 = 3 Trw 4 = 3	Kasubbag Umum
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.070.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Trw 1 = 21 Trw 2 = 21 Trw 3 = 21 Trw 4 = 21	Kasubbag Umum
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.268.000	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Trw 1 = 25 % Trw 2 = 25 % Trw 3 = 25 % Trw 4 = 25 %					Sekretaris Badan
											Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	Kasubbag Umum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Anggaran	Output Sub Kegiatan	Target	Penanggung Jawab	
											Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =	- - - -	Kasubbag Umum
											Pengadaan Mebel	66.932.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =	- 2 - 12	Kasubbag Umum
											Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.336.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =	- 2 - -	Kasubbag Umum
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.176.534.752	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Trw 1 = 25 % Trw 2 = 25 % Trw 3 = 25 % Trw 4 = 25 %						Sekretaris Badan
											Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =	25 25 25 25	Kasubbag Umum
											Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	718.928.736	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =	12 12 12 12	Kasubbag Umum
											Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =	- - - -	Kasubbag Umum
											Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	454.606.016	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =	11 11 11 12	Kasubbag Umum
											Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.148.391.000	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Trw 1 = 22,5 % Trw 2 = 22,5 % Trw 3 = 22,5 % Trw 4 = 22,5 %		
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	702.106.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =					20 20 20 20	Kasubbag Umum
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	177.770.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =					37 37 38 38	Kasubbag Umum
							Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	30.000.000	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =					- - - 1	Kasubbag Umum
							Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.675.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =					- 1 - -	Kasubbag Umum
							Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.840.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =					11 11 11 11	Kasubbag Umum
									Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Trw 1 = 72 Trw 2 = 72 Trw 3 = 72 Trw 4 = 72	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	32.901.312.134			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	66.286.964		Trw 1 = 25 % Trw 2 = 25 % Trw 3 = 25 %											Sekretaris Badan		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Anggaran	Output Sub Kegiatan	Target	Penanggung Jawab
							Perangkat Daerah			Trw 4 = 25 %					
											Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.345.664	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 2	Fungsional Perencana di Sekretariat
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.941.300	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Trw 1 = 2 Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	Fungsional Perencana di Sekretariat
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.835.025.170		Trw 1 = 25 % Trw 2 = 25 % Trw 3 = 25 % Trw 4 = 25 %					Sekretaris Badan
											Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.105.889.120	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Trw 1 = 105 Trw 2 = 105 Trw 3 = 105 Trw 4 = 105	Analisis Kebijakan di Sekretariat
											Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	445.280.650	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Trw 1 = 33 Trw 2 = 32 Trw 3 = 32 Trw 4 = 33	Analisis Kebijakan di Sekretariat
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	283.855.400	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = - Trw 4 = -	Analisis Kebijakan di Sekretariat



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. WIRIYA ALRAHMAN MM**
Jabatan : **Pj. BUPATI DELI SERDANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ir. WIRIYA ALRAHMAN MM

Lubuk Pakam,
Pihak Pertama

2024



MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si
NIP. 19710616 199803 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Poin
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	72 Nilai

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	46.726.198.808	P.APBD
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	29.207.677.308	P.APBD

Lubuk Pakam,

2024

Bupati Deli Serdang

Ir. WIRIYA ALRAHMAN MM



Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Deli Serdang

MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si
NIP. 19710616 199803 1 009



Buku Panduan

MAIN MENU

Profil

SKP

Tim Kerja

Angka Kredit

Persetujuan PAK

Rekap Keberatan

DASHBOARD

Dashboard

TRIWULAN II

1 April 2024 s/d 30 Juni 2024

Batas : 31 Agustus 2024

Atasan

HENDRA GUNAWAN AM

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Unit Kerja : Sekretariat

Cetak Form Penilaian

Cetak Dokumen Evaluasi Kinerja

Sesuai	Sesuai	Baik	-	Rencana Aksi Pengisian Bukti Dukung dan Lihat Hasil Feedback Perilaku Ajukan Keberatan Pembinaan
--------	--------	------	---	---

TRIWULAN III

1 Juli 2024 s/d 30 September 2024

Batas : 15 Oktober 2024

Atasan

HENDRA GUNAWAN AM

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Unit Kerja : Sekretariat

Cetak Form Penilaian

Cetak Dokumen Evaluasi Kinerja

Sesuai	Sesuai	Baik	-	Rencana Aksi Pengisian Bukti Dukung dan Lihat Hasil Feedback Perilaku Ajukan Keberatan Pembinaan
--------	--------	------	---	---



Perbandingan capaian penerimaan pajak daerah dengan Propinsi dan Nasional tahun 2023 :

Tabel 3.8.b. Perbandingan Capaian Propinsi dan Nasional

No	Jenis Penerimaan	Realisasi Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%
1	Perpajakan Nasional	2.118.348.000.000.000,00	2.155.420.000.000.000,00	101,75
2	Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara	7.427.338.695.260,00	6.667.891.089.707,94	89,77
3	Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang	1.268.083.193.305,00	797.734.218.178,00	62,91

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	100%	62,91%	62,91%	Belum optimalnya penggalan potensi pajak daerah.	Pendataan potensi di kecamatan dengan aplikasi e-PADI, dan pemeriksaan objek pajak di kecamatan.
						Kesadaran wajib pajak masih kurang.	Kegiatan pembuatan dan pemanfaatan peta bidang ZNT PBB dengan BPN.
							Melaksanakan kegiatan door to door pemungutan PBB ke desa-desa dan dusun-dusun.
							Pengaktifan kembali alat rekam data transaksi (tapping box) dan penambahan unitnya.
							Spanduk himbuan pembayaran pajak daerah.
						Belum adanya reward dan punishment bagi wajib pajak.	Sosialisasi / penyuluhan dan edukasi melalui tatap muka, media massa dan elektronik.
							Penyampaian surat pemberitahuan tunggakan pajak daerah.
							Penerapan denda atas keterlambatan pembayaran pajak daerah.

